

## E-Government Untuk Peningkatan Tata Kelola Informasi dan Pelayanan Desa Jagalempeni

Warjiyono<sup>1</sup>, Husni Faqih<sup>2</sup>

Jurusan Komputerisasi Akuntansi, AMIK BSI TEGAL  
warjiyono.wrj@bsi.ac.id, husni.hnf@bsi.ac.id

**Abstract-** This study aims to meet the needs of dissemination and acceptance of information from the Government of Jagalempeni Village as a state servant to the community of Jagalempeni Village. Currently information and services are carried out conventionally based on working hours, face-to-face so that services are limited, information is not extensive, potential areas are less well known, reports of unfree and less privileged citizens. Village website is needed for information more quickly, accurate conveyed, more maximal service and the existence of transparency of information and data. For that researchers will build an E-Government in the form of Village website with the concept of information, integration, interaction and service as a medium for improving **governance of information and public services Jagalempeni Village to a good village (Good Governance).**

**Keywords:** e-Government, Governance, Jagalempeni Village

**Abstract-** Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyebaran dan penerimaan informasi dari Pemerintah Desa Jagalempeni selaku abdi negara kepada masyarakat Desa Jagalempeni. Saat ini informasi dan pelayanan dilakukan secara konvensional berdasarkan jam kerja, *face-to-face* sehingga pelayanan terbatas, informasi tidak luas, potensi daerah kurang dikenal luas, laporan warga tidak bebas dan kurang priifasi. Website Desa sangatlah diperlukan agar informasi lebih cepat, akurat tersampaikan, pelayanan lebih maksimal dan adanya transparansi informasi dan data. Untuk itu peneliti akan membangun sebuah *E-Government* dalam bentuk website Desa dengan konsep informasi, integrasi, interaksi dan pelayanan sebagai media untuk peningkatan tata kelola informasi dan pelayanan publik Desa Jagalempeni menuju Desa yang baik (*Good Governance*).

**Keywords :** e-Government, Tata Kelola, Desa Jagalempeni

### I. PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan wajib bagi setiap individu, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan pemerintahan. Hal tersebut mendorong perkembangan teknologi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Distribusi informasi dan data sudah tidak mengenal batas wilayah, negara, waktu dan tempat. Semua bisa diakses secara mudah oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, semua terasa cepat dan praktis. Bagi yang belum memafaatkan internet sebagai media informasi dan pelayanan maka siap-siaplah untuk mengalami kemunduran.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, dalam hubungannya dengan peningkatan pelayanan publik, kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan pemerintah untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi. Dengan E-government pemerintah dapat mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan

proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu. Maksud dari hal ini adalah bahwa pemerintah harus menyediakan akses yang mudah dan sederhana ke semua informasi dan layanan publik.

Wilayah administrasi Kabupaten Brebes terbagi atas 17 kecamatan terdiri dari 292 desa dan lima kelurahan dengan luas wilayah 166,117 hektare yang terdiri dari lima kecamatan wilayah pantai, sembilan kecamatan dataran rendah, dan tiga kecamatan dataran tinggi atau perbukitan. Desa Jagalempeni merupakan desa yang berada di Kabupaten Brebes Kecamatan Wanasari Propinsi Jawa Tengah. Desa Jagalempeni mempunyai luas wilayah 419,76 hektar dengan tipologi adalah perladangan. Mata pencaharian masyarakatnya lebih banyak petani dan buruh tani karena Desa Jagalempeni termasuk penghasil bawang merah terbesar di Kabupaten Brebes.

Pasal 86 UU Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa, Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Desa Jagalempeni dengan Ibu Siti Maemunah bahwa Desa Jagalempeni saat ini mempunyai permasalahan seperti kurang terpublisnya berita desa, informasi desa, potensi desa, kegiatan-kegiatan desa, pelayanan desa hingga komunikasi antara masyarakat dengan pihak desa. Atas dasar itulah yang mendorong Desa Jagalempeni harus memiliki website desa yang difungsikan untuk manajemen informasi desa dan kemudahan pelayanan masyarakat sehingga terjadi informasi lebih cepat, akurat, transparan dan meningkatnya pelayanan desa.

Holle menjelaskan adanya upaya untuk meminimalisir dan menghilangkan praktek maladministrasi, salah satunya dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bingkai *e-government* yang dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan kontak langsung dalam pemberian pelayanan penyebab terjadinya praktek maladministrasi (Holle, 2011).

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Membangun sistem informasi berbasis website sebagai media untuk publikasi informasi dan potensi desa, pelayanan desa untuk menjadi lebih baik.
2. Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk tata kelola informasi dan layanan publik Desa Jagalempeni.
3. Mengimplementasikan ide dan keinginan Desa Jagalempeni untuk mempunyai E-government sebagai website Desa guna mendorong menjadi masyarakat informasi.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Masyarakat dan perangkat Desa Jagalempeni akan mempunyai E-Government sebagai sistem informasi berbasis Web untuk mempromosikan potensi-potensi desa, informasi, agenda dan peningkatan layanan lainnya.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat Desa Jagalempeni menjadi masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi dan mengikuti keterbukaan akan informasi dan layanan administratif desa.
3. Hasil penelitian ini diharapkan menjadikan Desa Jagalempeni lebih maju, lebih terbuka, lebih transparan dan meningkatkan layanan dan taraf hidup warga Desa Jagalempeni

## II. RELATED WORK

Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan pengambilan keputusan administratif, memberikan layanan kepada warga dan mendukung perubahan organisasi pemerintah kota lainnya yang diperlukan untuk kinerja yang lebih baik merupakan konsep dari *Smart City*. Dalam mengimplementasikannya, e-government mengusulkan lima model yaitu *strategic intent, data, technology, governance & service delivery model* dan *stakeholder engagement*. Pendekatan baru ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih bermanfaat bagi administrasi pemerintahan kota.

Untuk mempelajari adopsi e-government, penelitian ini mengulas secara luar berbagai model *e-government* yang telah digunakan. Temuan menunjukkan bahwa harapan kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, memberikan kondisi memfasilitasi, kondisi memfasilitasi tersedia, kepercayaan dalam pemerintahan, kepercayaan dalam teknologi dan kepuasan warga merupakan faktor utama yang berkaitan dengan adopsi e-government.

*E-government* dapat mengubah cara warga berurusan dengan kantor pemerintah. Warga negara dapat menyelesaikan transaksi tanpa perlu untuk mengunjungi kantor pemerintah. Hal itu juga menyatakan bahwa *e-government* dapat menghasilkan penghematan besar untuk entitas pemerintah. Sebagai definisi yang lebih luas, *e-government* berhubungan dengan penggunaan IT di umum untuk meningkatkan transaksi antara pemerintah dan warganya. Tiga kategori untuk membangun *e-government* berkualitas tinggi:

### 1. Back-end

Kategori ini terdiri dari *centricity* pelanggan, interoperabilitas, penggunaan standar, modularitas, keamanan, privasi, *single sign-on*, delegasi, e-partisipasi, pembayaran, alur kerja, dan subkategori responsif.

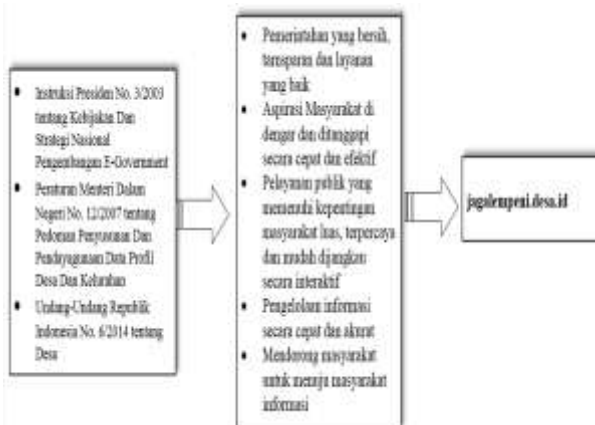
### 2. Front-end

Kategori ini meliputi subkategori *one-stop shop*, kemudahan navigasi, jaringan sosial, personalisasi, pengguna, industrialisasi, dan strukturasi. Sementara, praktek konten web terbaik meliputi relevansi, aksesibilitas, mesin pencari, perubahan berkala, konten yang kaya, permainan interaktif, aplikasi ponsel, laporan, translation, dan dimengerti.

3. Praktek terbaik eksternal yang dianggap sebagai non-teknis dan tidak langsung terkait dengan aspek teknis dari e-portal. Ini termasuk iklan, referensi, insentif, kontes, dan subkategori usability.

### III. METODOLOGY

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan daftar pustaka. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk keperluan konten di website Desa Jagalempeni. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data terkait dengan permasalahan, harapan dan gagasan yang akan dituangkan ke dalam website ini. Studi Pustakadilakukan untuk mendapatkan referensi, metode dan konsep sebuah E-Government yang baik menurut para ahli.



Gambar 1. Pemikiran pembuatan website Desa Jagalempeni

Sesuai dengan model Hiller dan Belanger (2001), berikut merupakan definisi dari e-government:

1. **Information**  
Merupakan bentuk paling dasar dari situs Web yaitu postingan informasi.
2. **Interaction**  
Melibatkan komunikasi antara warga dan pemerintah.
3. **Transaction**  
Layanan online dan transaksi keuangan tersedia untuk digunakan oleh warga.
4. **Integration**  
Semua layanan terhubung. Sebuah e-portal tunggal dapat digunakan untuk mengakses semua layanan e-government.
5. **Participation**  
Fitur partisipasi politik, posting komentar dan voting.

Model Alhomod dan Shafi

Alhomod dkk (2012) menyatakan bahwa terdapat empat tahapan e-government, antara lain:

1. **Presence on the web**  
Tahap pertama e-government ini hanya menyediakan, mendistribusikan informasi

kepada publik tetapi tidak memiliki kemampuan interaksi.

2. **Interaction between the citizen and the government**

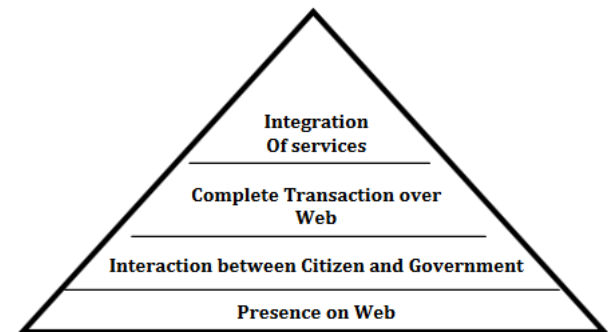
Tahap kedua ini ditandai dengan kehadiran sebuah antarmuka web interaktif di mana beberapa jenis komunikasi terjadi antara pemerintah dan warganya melalui web.

3. **Complete transaction over the web**

Tahap ini melibatkan transaksi antara warga dan pemerintah seperti pembayaran tagihan & pajak.

4. **Integration of services**

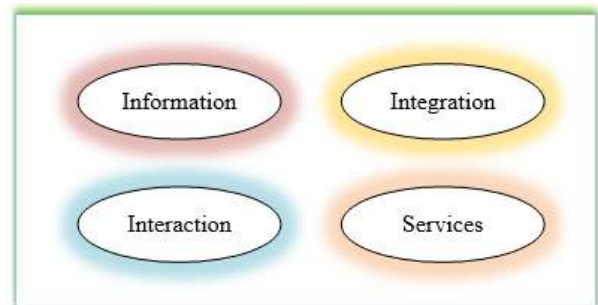
Tahap ini, berbagai departemen pemerintah berbagi informasi antara satu sama lain dan juga menawarkan jasa kepada warga secara online.



Gambar 2. Tahapan E-Government

Sumber: Alhomod dkk (2012)

### IV. HASIL



Gambar 3. Konsep Website Desa Jagalempeni

Gambar 3 menunjukkan tentang Konsep Web Desa Jagalempeni, antara lain:

1. **Information**

Tersedia berbagai macam informasi desa mulai dari profil desa, visi misi, wilayah desa, statistik data desa, kontak desa, maps, berita desa, potensi desa, galery desa, pengumuman-pengumuman, kegiatan-kegiatan desa yang harus dipublikasikan secara lengkap, terkini dan akurat.

## 2. Interaction

Tersedia komunikasi antara warga dan perangkat desa Jagalempeni melalui *chatting* untuk tanya jawab dengan perangkat Desa Jagalempeni

## 3. Integration

Tersedia akses *link* dengan perangkat pemerintah khususnya Kabupaten sehingga masyarakat akan mudah mencari dan terhubung dengan yang lainnya

## 4. Participation

Tersedia fitur untuk posting komentar, laporan warga, voting, testimoni dari warga terhadap pelayanan yang diberikan oleh perangkat Desa Jagalempeni.



Gambar 4. Website Desa Jagalempeni

## IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memfasilitasi informasi dan komunikasi antara perangkat Desa Jagalempeni dengan warganya. Memunculkan potensi-potensi desa yang selama ini terpendam akan muncul ke permukaan dan dikenal banyak orang sehingga akan tumbuh dan berkembang potensi perekonomian tersebut.

E-Government Desa Jagalempeni sebagai sistem informasi berbasis website diharapkan menjadi media informasi, interaktif, integrasi dan servis yang baik media menuju tata kelola informasi dan layanan publik yang lebih baik dan transparan.

Untuk kesempurnaan e-Government ini perlu adanya masukan dari masyarakat dan kedepannya akan dilakukan penelitian E-Government Desa Jagalempeni untuk mengetahui tingkat efektif website tersebut, berapa besar dukungan terhadap akses website tersebut.

## REFERENSI

- [1] Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia.
- [2] <http://www.jatengprov.go.id/id/profil/kabupaten-brebes> diakses 1 Feb 2017 pukul 08:57 Wib
- [3] Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- [4] Holle, "Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service". Jurnal Sasi Vol.17 No.3 2011.
- [5] Gilberto Madeira; Tor Guimaraes; Leonardo de Souza Mendes. Assessing some models for city e-government implementation: a case study. *Electronic Government, an Int. J.*, 2016 Vol.12, No.1, pp.86 – 105. <http://www.inderscience.com/offer.php?id=74250>.
- [6] Kriti Priya Gupta; Swati Singh; Preeti Bhaskar. Citizen adoption of e-government: a literature review and conceptual framework. *Journal: Electronic Government, an Int. J.*, 2016 Vol.12, No.2, pp.160 – 185. <http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=76134>
- [7] Abdoullah Fath-Allah and Laila Cheikhi. E-government portals best practices: a comprehensive survey. *Electronic Government, An International Journal*, Vol. 11, Nos. 1/2, 2014. <http://www.inderscience.com/storage/f124821563111097.pdf>
- [8] Hiller, J. S., & Belanger, F. (2001). "Privacy strategies for electronic government". *E-Government Series*. Retrieved with <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.470.2867&rep=rep1&type=pdf>
- [9] Alhomod, S. M., Shafi, M. M., Kousarrizi, M. N., Seiti, F., Teshnehab, M., Susanto, H., Batawi, Y. A. (2012). "Best Practices in E government: A review of Some Innovative Models Proposed in Different Countries". *International Journal of Electrical & Computer Sciences*, 12(01), 1–6.